**PROGRAM PEMERINTAH DAN DINAMIKA PARTISIPASI
MASYARAKAT UNTUK OPTIMALISASI KEBERFUNGSIAN SOSIAL**

**Dyana Chusnulitta Jatnika¹,
Sahadi Humaedi², Farah Putri
Firsanty³**

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Padjadjaran

Article history

Received : 08 Januari 2025

Revised : 25 Januari 2025

Accepted : 30 Januari 2025

*Corresponding author

Email : dyana.jatnika@unpad.ac.id

No. doi: [10.24198/focus.v7i2.60625](https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60625)

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam program pemerintah memegang peranan penting dalam mengoptimalkan potensi keberfungsian sosial masyarakat. Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika partisipasi masyarakat dalam program pemerintah serta dampaknya terhadap keberfungsian sosial. Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis literatur yang relevan, memanfaatkan data dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan. Hasil kajian dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat bervariasi, tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Partisipasi aktif dalam perencanaan program cenderung meningkatkan rasa memiliki terhadap program, sementara keterlibatan yang efektif pada tahap pelaksanaan dan evaluasi mampu memperkuat kohesi sosial, solidaritas komunitas, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, ditemukan bahwa hambatan dalam komunikasi, kurangnya transparansi, dan kapasitas masyarakat yang terbatas sering menjadi kendala dalam menciptakan partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi peningkatan kapasitas masyarakat, transparansi informasi, dan pendekatan yang inklusif sangat penting untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Keberfungsian Sosial, Program Pemerintah

ABSTRACT

Community participation in government programs plays a crucial role in optimizing the potential for social functioning within society. This study aims to explore the dynamics of community participation in government programs and its impact on social functioning. A library research approach was used to analyze relevant literature, utilizing data from scientific journals, books, and policy documents. The findings of this study indicate that the level of community participation varies depending on social, economic, and cultural contexts. Active participation in program planning tends to enhance a sense of ownership, while effective engagement in the implementation and evaluation stages strengthens social cohesion, community solidarity, and trust in the government. However, communication barriers, lack of transparency, and limited community capacity are often obstacles to creating

inclusive and sustainable participation. This study concludes that strategies to enhance community capacity, ensure information transparency, and adopt inclusive approaches are crucial to improving the effectiveness of community participation.

Key word: *community participation, social functioning, government programmes*

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam program publik milik pemerintah menjadi komponen penting untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Keberfungsian sosial mencerminkan kemampuan individu dan kelompok untuk menjalankan peran sosialnya secara optimal dalam masyarakat (Aroogh & Shahboulaghi, 2020). Keberfungsian sosial yang optimal bergantung pada tiga elemen utama: individu yang mampu memainkan peranan sosialnya, lingkungan yang mendukung, dan interaksi yang saling menguntungkan diantara keduanya. Dalam program pemerintah, partisipasi masyarakat memainkan peranan penting untuk memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menciptakan rasa memiliki (*ownership*).

Lebih jauh, konsep partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif individu dan kelompok dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program atau kebijakan publik (Quick & Bryson, 2022). Konsep keberfungsian sosial, di sisi lain, mencakup kemampuan masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi sosial yang mencakup aspek ekonomi, budaya, dan relasi interpersonal (Aroogh & Shahboulaghi, 2020). Dalam konteks ini, program pemerintah menjadi instrumen penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat keberfungsian sosial secara simultan (Madzivhandila & Maloka, 2014).

Dalam hal ini, beberapa studi menunjukkan bahwa program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan ketika partisipasi masyarakat rendah atau tidak terarah (Madzivhandila & Maloka, 2014). Sebaliknya, keberhasilan program pemerintah dapat meningkat signifikan dengan keterlibatan aktif masyarakat yang berbasis pada modal sosial yang kuat (Aprilia et al., 2023). Padahal, program pemerintah yang ditujukan untuk menyelenggarakan pelayanan publik seyogianya mendorong partisipasi aktif dari masyarakat guna mengoptimalkan kebermanfaatan program untuk kesejahteraan dan memastikan masyarakat dapat memainkan peranan sosialnya dengan baik.

Dalam beberapa penelitian, partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai instrumen untuk keberhasilan program, tetapi juga sebagai elemen yang dapat memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah, meningkatkan kohesi sosial, dan memperbaiki tata kelola program (Jewett et al., 2021; Schmidhuber et al., 2021). Sebagai contoh, dalam program pengelolaan kawasan lindung untuk pembangunan berkelanjutan, partisipasi aktif masyarakat memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat hubungan antara komunitas lokal dan pemerintah (Rahman et al., 2022). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi berbasis lokal,

seperti pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menunjukkan peningkatan kemandirian ekonomi, peningkatan rasa percaya diri, dan hubungan sosial yang lebih erat di antara anggota masyarakat (Aprilia et al., 2023).

Beberapa penelitian di atas telah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif terhadap program publik milik pemerintah berpotensi memiliki dampak positif terhadap keberfungsian sosial mereka. Dalam aspek ekonomi, misalnya, keterlibatan Masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha, membuka lapangan kerja, dan berpotensi memiliki dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan. Dari sisi sosial, partisipasi aktif mendorong terbentuknya solidaritas antarwarga, memperkuat jejaring sosial, dan menciptakan ruang kolaborasi yang lebih inklusif. Selain itu, dalam aspek budaya, program-program yang melibatkan masyarakat secara aktif sering kali dapat melestarikan nilai-nilai lokal dan memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya mendorong keberhasilan program pemerintah, tetapi juga memperkuat keberfungsian sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Namun, meskipun urgensinya telah dipahami, beberapa penelitian masih menunjukkan keterbatasan angka partisipasi masyarakat yang menjadi tantangan dalam implementasi program pemerintah (Giani et al, 2023; Nanda et al, 2018; Yunita dan Idrus, 2023). Dinamika partisipasi dipengaruhi oleh ragam faktor, seperti kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, hambatan komunikasi, dan desain program yang tidak inklusif (Mansoor, 2021; Kiss et al., 2022). Dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat, beberapa studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya

mempercepat keberhasilan implementasi program, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah, meningkatkan kohesi sosial, dan memperbaiki tata kelola program (Jewett et al., 2021; Schmidhuber et al., 2021). Namun, dinamika tersebut belum secara menyeluruh menyentuh dimensi sosial pada masyarakat sebagai penerima manfaat utama.

Dalam konteks Indonesia, kajian penelitian ini juga memperhatikan bagaimana dinamika partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh keragaman budaya dan geografis. Penelitian Tong et al. (2024) menyoroti bahwa pendekatan berbasis lokal yang menghargai nilai-nilai budaya setempat cenderung lebih berhasil dalam mendorong partisipasi. Sebagai contoh, program-program yang melibatkan tokoh masyarakat atau lembaga adat sering kali mendapatkan dukungan yang lebih besar karena dianggap lebih relevan dengan kebutuhan lokal.

Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor dinamika partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam keberhasilan program pemerintah yang mana juga turut berkontribusi terhadap optimalisasi keberfungsian sosial. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada partisipasi masyarakat sebagai sebuah hasil (Ge et al., 2021) atau sebagai elemen dalam tata kelola program tertentu (Quick & Bryson, 2022). Namun, penelitian yang mengkaji secara khusus mengenai dampak dari partisipasi masyarakat dalam program pemerintah sebagai sebuah dinamika yang berdampak terhadap keberfungsian sosial masih terbatas.

Di samping itu, secara khusus kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika partisipasi masyarakat dalam program pemerintah; mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat dalam konteks keberfungsian sosial; memberikan rekomendasi strategis

untuk meningkatkan keberfungsian sosial melalui optimalisasi partisipasi masyarakat dalam program pemerintah.

Persoalan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika partisipasi masyarakat mempengaruhi keberfungsian sosial dalam konteks program pemerintah. Penelitian ini akan menggali lebih dalam proses, hambatan, dan peluang yang ada dalam keterlibatan masyarakat, dengan mengedepankan pendekatan berbasis bukti dari berbagai studi sebelumnya (Chen et al., 2021; Tong et al., 2024). Penelitian ini juga akan menawarkan perspektif baru yang relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah melalui partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan menggali lebih dalam dinamika partisipasi masyarakat, kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung keberhasilan program pemerintah. Strategi-strategi yang diusulkan diharapkan dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan tujuan untuk mengkaji berbagai literatur, teori, dan hasil penelitian sebelumnya terkait partisipasi masyarakat dan keberfungsian sosial dalam program pemerintah. Studi kepustakaan dipilih untuk memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami hubungan dinamis antara partisipasi masyarakat dan keberfungsian sosial berdasarkan bukti empiris dari berbagai konteks.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder yang mencakup artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu,

penelitian ini juga memanfaatkan buku dan laporan penelitian yang membahas konsep partisipasi masyarakat, modal sosial, dan keberfungsian sosial. Dokumen kebijakan terkait program pemerintah yang mencakup aspek partisipasi masyarakat juga menjadi sumber data penting, ditambah dengan sumber data daring terpercaya seperti database Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi kata kunci seperti "community participation," "social functioning," "government programs," dan "public trust" untuk memperoleh literatur yang relevan.

Teknik Analisis Data

Data yang ada dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam literatur terkait dinamika partisipasi masyarakat, mengevaluasi kesenjangan penelitian (*research gap*) berdasarkan hasil analisis literatur, dan menyusun sintesis teori yang relevan untuk menjawab tujuan penelitian. Pendekatan ini mencakup analisis konten untuk menggali tema-tema kunci dari literatur yang dikaji dan metode triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur.

Analisis konten dilakukan melalui beberapa langkah sistematis. Pertama, literatur yang diperoleh dari hasil pencarian disaring berdasarkan kriteria relevansi dan kualitas. Hanya literatur yang relevan dengan tema partisipasi masyarakat dan keberfungsian sosial yang dimasukkan ke dalam analisis. Kedua, isi literatur dikategorikan ke dalam tema-tema utama, seperti "partisipasi masyarakat," "dampak partisipasi terhadap keberfungsian sosial," dan "partisipasi masyarakat dalam program pemerintah." Ketiga, tema-tema ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola umum, kesenjangan dalam penelitian, serta potensi kontribusi terhadap pengembangan teori atau praktik.

Pendekatan triangulasi diterapkan dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai sumber. Misalnya, hasil penelitian Aprilia et al. (2023) tentang peran modal sosial dalam pengembangan komunitas dibandingkan dengan temuan Jewett et al. (2021) tentang kohesi sosial selama pandemi COVID-19. Selain itu, dokumen kebijakan seperti yang diterbitkan oleh WHO (2018) digunakan untuk melengkapi hasil analisis jurnal akademik, memberikan perspektif praktis tentang bagaimana partisipasi masyarakat diterapkan dalam konteks kebijakan global.

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan literatur dari sumber yang kredibel dan terverifikasi. Artikel jurnal yang digunakan berasal dari jurnal internasional bereputasi, seperti *Environmental Policy and Governance* (Kiss et al., 2022) dan *International Journal of Tourism Research* (Rahman et al., 2022). Selain itu, penelitian ini mengutamakan literatur yang telah melalui proses peer-review, sehingga kualitas data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode triangulasi juga digunakan untuk meningkatkan validitas. Misalnya, temuan dari penelitian empiris dibandingkan dengan laporan kebijakan global untuk melihat konsistensi hasil. Selain itu, penelitian ini melakukan peer-review internal terhadap analisis data, dimana hasil analisis dievaluasi oleh rekan peneliti untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibuat tidak bias dan sesuai dengan bukti yang ada.

Reliabilitas penelitian dijaga melalui dokumentasi yang sistematis dari setiap tahap proses analisis. Setiap literatur yang digunakan dicatat dengan detail, termasuk sumber, tahun publikasi, dan relevansi terhadap tema penelitian. Selain itu, perangkat lunak manajemen referensi, seperti Mendeley, digunakan untuk

memastikan bahwa semua literatur yang dirujuk tercatat dengan akurat.

Justifikasi Metodologi

Pendekatan studi kepustakaan dipilih karena memungkinkan penelitian ini untuk mengintegrasikan berbagai pandangan dan temuan dari literatur yang berbeda, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang topik yang dikaji. Metode ini juga cocok untuk mengeksplorasi hubungan antara partisipasi masyarakat dan keberfungsian sosial, yang melibatkan berbagai faktor kompleks seperti modal sosial, komunikasi, dan dinamika budaya.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Quick dan Bryson (2022), menunjukkan bahwa studi kepustakaan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoritis dan memberikan dasar bagi penelitian empiris di masa depan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan studi kepustakaan memberikan kesempatan untuk mengevaluasi berbagai model partisipasi masyarakat, dari pendekatan tradisional hingga inovasi berbasis teknologi, seperti yang dibahas oleh Chen et al. (2021).

Namun, penelitian ini juga menyadari keterbatasan dari pendekatan studi kepustakaan. Salah satu kekurangannya adalah tidak adanya data empiris langsung, yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang konteks spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya studi lanjutan yang melibatkan data primer untuk menguji temuan-temuan yang dihasilkan dari analisis literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini bertujuan untuk menggali dinamika partisipasi masyarakat dalam program pemerintah serta dampaknya terhadap keberfungsian sosial masyarakat. Dengan menganalisis berbagai literatur dan konsep, pembahasan difokuskan pada bagaimana partisipasi masyarakat dapat

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan program pemerintah, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta menawarkan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemerintah

Hasil kajian menunjukkan bahwa dinamika partisipasi masyarakat dalam program pemerintah dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pada tahap perencanaan, hasil penelitian mendukung temuan Quick dan Bryson (2022) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan cenderung meningkatkan rasa memiliki terhadap program. Namun, dalam banyak kasus, tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini masih terbilang rendah karena keterbatasan transparansi informasi dan hambatan komunikasi antara pihak pemerintah dan masyarakat (Mansoor, 2021; Kiss et al., 2022).

Pada tahap pelaksanaan, masyarakat cenderung lebih aktif terlibat ketika program beririsan secara langsung dengan kebutuhan mereka. Hal ini sesuai dengan studi Aprilia et al. (2023) yang menekankan pentingnya modal sosial sebagai pendorong partisipasi aktif. Namun, ditemukan bahwa pola partisipasi sering kali bersifat *top-down*, di mana masyarakat hanya berperan sebagai pelaksana daripada pengambil keputusan. Akibatnya, potensi kreatif masyarakat dalam mengadaptasi program sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal. Tahap evaluasi, yang seharusnya menjadi momen reflektif untuk meningkatkan program di masa depan, menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih rendah dibandingkan dua tahap sebelumnya. Hal

ini konsisten dengan penelitian Madzihandila dan Maloka (2014), yang menyoroti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menilai dampak program.

Dinamika partisipasi dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun hubungan yang berbasis pada kepercayaan. Penelitian Mansoor (2021) menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih aktif berpartisipasi jika mereka memberikan kepercayaan terhadap pemerintah dan memiliki penerimaan bahwa kontribusi mereka dihargai. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui keterbukaan informasi dan upaya untuk mengatasi ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya, dalam konteks program pemberdayaan perempuan di pedesaan, masyarakat yang merasa didengarkan dan dilibatkan dalam setiap penyelenggaraan tahapan program lebih cenderung memberikan dukungan penuh dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Aroogh & Shahboulaghi, 2020; Aprilia et al., 2023).

Selain itu, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor kunci keberhasilan partisipasi. Penelitian Chen et al. (2021) menunjukkan bahwa teknologi dapat memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan komunikasi. Penggunaan platform digital, seperti aplikasi pemerintah atau media sosial, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi dan memberikan umpan balik. Namun, efektivitas teknologi ini bergantung pada tingkat literasi digital masyarakat dan aksesibilitas teknologi itu sendiri.

Selain itu, faktor budaya memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat bersedia untuk berpartisipasi. Dalam beberapa komunitas, norma budaya yang kuat dapat menjadi penghalang bagi partisipasi inklusif, terutama bagi

kelompok rentan seperti perempuan, anak muda, atau kelompok minoritas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memahami dinamika budaya lokal dan merancang program yang sensitif terhadap konteks lokal tersebut (Jewett et al., 2021; Kiss et al., 2022).

Perbedaan konteks sosial-ekonomi juga memberikan pengaruh terhadap dinamika partisipasi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap hak dan tanggung jawab mereka, sehingga partisipasi mereka cenderung lebih aktif dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih rendah (Schmidhuber et al., 2021; Rahman et al., 2022). Faktor ekonomi, seperti ketersediaan sumber daya, juga mempengaruhi tingkat keterlibatan. Dalam komunitas dengan sumber daya yang terbatas, masyarakat mungkin lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga partisipasi mereka dalam program-program pemerintah yang dirasa kurang relevan dengan kebutuhan sehari-hari menjadi terbatas.

Selain itu, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor kunci keberhasilan partisipasi. Penggunaan teknologi juga mulai mempengaruhi dinamika partisipasi masyarakat. Penelitian Chen et al. (2021) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa teknologi dapat memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan komunikasi. Sebagai contoh, penggunaan platform digital dapat membantu masyarakat untuk terlibat secara lebih aktif dalam program-program pemerintah. Penggunaan platform digital, seperti aplikasi pemerintah atau media sosial, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi dan memberikan umpan balik. Namun, efektivitas teknologi ini bergantung pada tingkat literasi digital masyarakat dan aksesibilitas teknologi itu sendiri.

Secara keseluruhan, dinamika partisipasi masyarakat ini mencerminkan tantangan dalam menciptakan mekanisme partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih partisipatif untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat menjadi penting untuk diperhatikan dalam setiap tahap proses program.

Dampak Partisipasi Masyarakat terhadap Keberfungsian Sosial

Kajian literatur dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat memiliki korelasi positif dengan keberfungsian sosial, sebagaimana didefinisikan oleh Aroogh dan Shahboulaghi (2020). Keberfungsian sosial meliputi kemampuan masyarakat untuk menjalankan peran-peran sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam program-program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, seperti pengelolaan sumber daya lokal dan pembangunan infrastruktur desa, ditemukan peningkatan dalam aspek keberfungsian sosial, termasuk kohesi sosial, solidaritas antar warga, dan kepercayaan terhadap pemerintah (Mansoor, 2021; Rahman et al., 2022).

Namun, dalam beberapa konteks, partisipasi yang rendah cenderung berbanding lurus dengan keberfungsian sosial yang rendah pula. Misalnya, studi kasus pada program pengelolaan kawasan pesisir yang mana tidak mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan cenderung diselenggarakan secara *top down* menunjukkan ketidakmampuan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan hasil program (Rahman et al., 2022). Hal ini diperparah oleh kurangnya kapasitas masyarakat dalam memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan keberfungsian sosial.

Selain kohesi sosial, partisipasi masyarakat juga berdampak pada kemampuan komunitas untuk membangun ketahanan sosial terhadap berbagai tantangan. Penelitian Jewett et al. (2021) menyoroti bahwa komunitas yang memiliki tingkat partisipasi tinggi cenderung lebih mampu bertahan menghadapi krisis, seperti pandemi atau bencana alam. Hal ini disebabkan oleh hubungan antarwarga yang kuat, rasa solidaritas yang tinggi, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah bersama (Kiss et al., 2022; Haldane et al., 2019).

Dampak partisipasi masyarakat juga terlihat dalam konteks pengelolaan lingkungan. Penelitian Kiss et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam solusi berbasis alam tidak hanya meningkatkan keberfungsian sosial tetapi juga memperbaiki kondisi lingkungan secara keseluruhan. Sebagai contoh, program rehabilitasi hutan di beberapa daerah menunjukkan keberhasilan yang lebih besar ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi (Ge et al., 2021; Rahman et al., 2022).

Dalam konteks urbanisasi, keterlibatan masyarakat dalam program perencanaan kota pintar menjadi indikator penting keberhasilan. Anthony Jr (2024) mencatat bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait infrastruktur kota pintar cenderung memberikan kontribusi yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, partisipasi ini memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap proyek-proyek pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan keberlanjutan dan penerimaan program tersebut.

Namun, tidak semua partisipasi tersebut menghasilkan dampak positif. Dalam beberapa kasus, partisipasi yang tidak tepat pengelolannya justru dapat memperburuk konflik sosial. Sebagai

contoh, program redistribusi tanah yang tidak melibatkan semua pemangku kepentingan dapat memicu ketegangan antara kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses partisipasi dilakukan secara inklusif, transparan, dan berkeadilan (Madzivhandila & Maloka, 2014; Aprilia et al., 2023).

Pembahasan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam sebuah partisipasi yang efektif. Dalam konteks ini, modal sosial memainkan peran sentral, sebagaimana dibahas oleh Aprilia et al. (2023). Modal sosial yang kuat membantu membangun jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga menciptakan sinergi yang mendukung keberfungsian sosial secara keseluruhan.

Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemerintah

Kajian literatur dalam penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah strategi penting yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah. Salah satu strategi utama adalah peningkatan transparansi dan komunikasi. Penelitian Mansoor (2021) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat secara signifikan ketika informasi disampaikan secara terbuka, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mampu meningkatkan rasa kepemilikan yang lebih baik terhadap program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, penggunaan platform digital seperti media sosial dan aplikasi berbasis web memainkan peran

penting. Penelitian Chen et al. (2021) menekankan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarluaskan informasi program secara cepat dan luas, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pemerintah dapat memperkuat keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

Namun, pemanfaatan teknologi digital tanpa penguatan kapasitas masyarakat tidak cukup untuk menciptakan partisipasi yang efektif. Hasil analisis mengungkap bahwa masyarakat seringkali menghadapi hambatan dalam memahami dan berkontribusi pada program pemerintah oleh karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan terkait yang diperlukan. Penelitian Aprilia et al. (2023) dan Shaturaev (2021) menunjukkan bahwa program pendampingan literasi digital dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi kendala ini. Pelatihan ini berfungsi untuk mengatasi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, yang sering kali menjadi hambatan utama dalam proses partisipasi.

Selain penguatan kapasitas individu, strategi lainnya yang penting untuk diperhatikan adalah membangun mekanisme partisipasi yang lebih inklusif. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak muda, dan kelompok minoritas. Penelitian Anthony Jr. (2024) dan Jewett et al. (2021) menekankan bahwa inklusivitas tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan antar warga. Salah satu pendekatan yang efektif adalah berbasis komunitas, di mana program dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik

dan karakteristik lokal. Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga menciptakan rasa saling percaya yang lebih kuat. Program berbasis komunitas dapat mencakup dialog terbuka, konsultasi dengan tokoh masyarakat, atau pembentukan kelompok kerja lokal yang mewakili berbagai lapisan masyarakat.

Di era digital, pendekatan berbasis teknologi menjadi salah satu solusi utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pandemi COVID-19, penggunaan aplikasi digital dan platform media sosial telah memungkinkan masyarakat untuk tetap terlibat dalam program pemerintah meskipun terdapat pembatasan fisik. Penelitian Chen et al. (2021) menunjukkan bahwa platform digital dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit diakses, sehingga memperluas basis partisipasi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak memperburuk kondisi kesenjangan digital yang ada di masyarakat. Ketersediaan akses internet yang tidak merata dan tingkat literasi digital yang rendah menjadi tantangan utama dalam penerapan strategi ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi bagi masyarakat di wilayah terpencil atau kelompok yang kurang mampu.

Peran pemerintah sebagai fasilitator juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat. Pemerintah dapat mengambil langkah proaktif dengan menciptakan kebijakan yang mendorong partisipasi, seperti penghapusan hambatan birokrasi yang sering kali memperlambat proses partisipasi masyarakat. Penelitian Barrutia dan Echebarria (2021) menyoroti pentingnya penghapusan hambatan struktural ini untuk menciptakan interaksi yang lebih dinamis antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, penyediaan

anggaran khusus untuk mendukung inisiatif berbasis masyarakat dapat menjadi insentif yang efektif untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas program, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program tersebut. Schmidhuber et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan semacam ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan program secara keseluruhan.

Implementasi strategi-strategi ini juga membutuhkan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi ini untuk mendapatkan masukan langsung dari mereka yang terdampak oleh program tersebut. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan strategi yang terintegrasi dan berbasis bukti, diharapkan program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat, dan menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan program pemerintah dan keberfungsian sosial masyarakat. Dinamika partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan mereka di setiap tahap program, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, menjadi penting, ragam tantangan perlu diatasi. Faktor-faktor seperti transparansi informasi, hambatan komunikasi, pola partisipasi yang *top-down*, dan kurangnya kapasitas masyarakat menjadi isu utama dalam menciptakan partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat yang efektif memiliki dampak positif terhadap keberfungsian sosial masyarakat dalam ragam aspek kehidupan, termasuk di ranah perekonomian, juga diantaranya peningkatan kohesi sosial, solidaritas antar warga, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, partisipasi yang rendah dapat menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan hasil program, serta menghambat pencapaian tujuan keberfungsian sosial.

Untuk mengatasi tantangan ini, strategi-strategi yang melibatkan peningkatan transparansi, penguatan kapasitas masyarakat, dan pendekatan inklusif menjadi relevan. Transparansi informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sementara pelatihan dan pendidikan membantu masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih efektif. Selain itu, pendekatan inklusif memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam program-program pemerintah.

Pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat. Dengan mengadopsi strategi-strategi tersebut, diharapkan program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, memberikan dampak positif terhadap keberfungsian sosial, dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kajian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama, yakni kesejahteraan sosial yang merata.

Keterbatasan Studi

Sebagai kajian berbasis studi kepustakaan, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi hasil. Analisis dilakukan berdasarkan sumber-sumber sekunder yang relevan, tetapi tidak melibatkan data empiris langsung. Oleh

karena itu, hasil dan rekomendasi dari penelitian ini lebih bersifat teoritis dan konseptual, sehingga berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Selain itu, tidak semua aspek partisipasi masyarakat dapat dianalisis secara mendalam karena keterbatasan ruang lingkup penelitian ini. Beberapa faktor seperti dinamika politik lokal, perbedaan demografis, dan pengaruh teknologi digital terhadap partisipasi masyarakat hanya dibahas secara umum.

Kajian ini juga terbatas dalam hal fokus geografis. Sebagian besar literatur yang dianalisis berasal dari konteks global, sehingga konteks lokal di beberapa wilayah tertentu di Indonesia berpotensi menjadi kajian selanjutnya yang perlu ditelaah. Selain itu, penelitian ini tidak mencakup evaluasi longitudinal tentang bagaimana partisipasi masyarakat berubah seiring waktu dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Untuk memperluas temuan dalam penelitian ini, diperlukan studi empiris yang melibatkan data primer, seperti wawancara, survei, atau studi kasus lapangan. Penelitian mendalam tentang bagaimana faktor budaya dan konteks lokal mempengaruhi partisipasi masyarakat dapat memberikan wawasan yang lebih spesifik dan aplikatif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga direkomendasikan untuk mempertimbangkan analisis longitudinal untuk mengevaluasi efektivitas partisipasi masyarakat dalam jangka panjang, termasuk bagaimana dinamika tersebut dipengaruhi oleh perubahan kebijakan atau kondisi sosial-ekonomi.

Penelitian selanjutnya juga perlu fokus pada pengaruh teknologi digital dalam mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, studi tentang bagaimana platform digital dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan peluang partisipasi dapat memberikan

kontribusi yang signifikan dalam merancang program pemerintah yang lebih inklusif. Selain itu, penelitian ini juga dapat melibatkan analisis perbandingan antarnegara atau antardaerah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, kajian lebih lanjut tentang pengembangan kapasitas masyarakat dalam konteks partisipasi juga sangat diperlukan. Penelitian dengan tujuan eksplorasi terhadap pendekatan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan komunitas untuk meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat akan sangat bermanfaat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur tentang partisipasi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan program-program pemerintah yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Jr, B. (2024). The role of community engagement in urban innovation towards the co-creation of smart sustainable cities. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(1), 1592-1624.
- Aroogh, M. D., & Shahboulaghi, F. M. (2020). Social participation of older adults: A concept analysis. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*, 8(1), 55.
- Aprilia, E., Prayitno, G., Usman, F., Biloshkurska, N. V., Siankwilimba, E., & Simamba, H. (2023). Social capital and community participation in the development of the aquaculture center in Soko Village-Indonesia. *Journal of Regional and Rural Studies*, 1(1), 6-14.
- Barrutia, J. M., & Echebarria, C. (2021). Effect of the COVID-19 pandemic on public managers' attitudes toward digital transformation. *Technology in Society*, 67, 101776.

- Chen, Q., Min, C., Zhang, W., Ma, X., & Evans, R. (2021). Factors driving citizen engagement with government TikTok accounts during the COVID-19 pandemic: Model development and analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 23(2), e21463.
- Dolezal, C., & Novelli, M. (2022). Power in community-based tourism: Empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(10), 2352-2370.
- Ge, T., Hao, X., & Li, J. (2021). Effects of public participation on environmental governance in China: A spatial Durbin econometric analysis. *Journal of Cleaner Production*, 321, 129042.
- Giani, M. N., Darmawan, A., & Hariyoko, Y. (2023). Partisipasi masyarakat dalam program padat karya Surabaya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 3(04), 186-195.
- Haldane, V., Chuah, F. L., Srivastava, A., Singh, S. R., Koh, G. C., Seng, C. K., & Legido-Quigley, H. (2019). Community participation in health services development, implementation, and evaluation: A systematic review of empowerment, health, community, and process outcomes. *PLOS One*, 14(5), e0216112.
- Jewett, R. L., Mah, S. M., Howell, N., & Larsen, M. M. (2021). Social cohesion and community resilience during COVID-19 and pandemics: A rapid scoping review to inform the United Nations research roadmap for COVID-19 recovery. *International Journal of Health Services*, 51(3), 325-336.
- Kiss, B., Sekulova, F., Hörschelmann, K., Salk, C. F., Takahashi, W., & Wamsler, C. (2022). Citizen participation in the governance of nature-based solutions. *Environmental Policy and Governance*, 32(3), 247-272.
- Madzivhandila, T. S., & Maloka, C. M. (2014). Community participation in local government planning processes: A paramount step towards a successful service delivery. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(16), 652-657.
- Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101597.
- Mketo, A. R., Ringo, C. J., Nuhu, S., & Mpambije, C. J. (2022). Enhancing community participation for environmental health improvement in rural Tanzania: Evidence from Bukombe district. *Evaluation and Program Planning*, 94, 102152.
- Nanda, L. D., Tan, F., & Noer, M. (2018). Tingkat partisipasi masyarakat dalam program penyelamatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(2), 105-115.
- Quick, K. S., & Bryson, J. M. (2022). Public participation. In *Handbook on Theories of Governance* (pp. 158-168). Edward Elgar Publishing.
- Rahman, M. K., Masud, M. M., Akhtar, R., & Hossain, M. M. (2022). Impact of community participation on sustainable development of marine protected areas: Assessment of ecotourism development. *International Journal of Tourism Research*, 24(1), 33-43.
- Schmidhuber, L., Ingrams, A., & Hilgers, D. (2021). Government openness and public trust: The mediating role of democratic capacity. *Public*

- Administration Review, 81(1), 91-109.
- Shaturaev, J. (2021). Indonesia: Superior policies and management for better education (Community development through Education). *Архив научных исследований*, 1(1).
- Tong, J., Li, Y., & Yang, Y. (2024). System construction, tourism empowerment, and community participation: The sustainable way of rural tourism development. *Sustainability*, 16(1), 422.
- Yunita, S., & Idrus, M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Lamonggi Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana). *SELAMI IPS*, 16(1), 62-67.